



PENERAPAN NIK SEBAGAI IDENTITAS PERPAJAKAN



djp

QR CODE



http://bit.ly/UMS_Presensi

- Hidupkan HP [1]
- Buka Tools [2]
- Scanner [3]



djp



LATAR BELAKANG

TAX RASIO YANG RENDAH DAN TINGGINYA SADOW ECONOMY

- Laporan Bank Dunia (2020) 'Public Expenditure Review: Spending for Better Results', rasio pajak Indonesia tercatat 10,2%, sekaligus menjadi salah satu yang terendah di antara negara-negara berkembang.
- Strategies of tax administrations to tackle the shadow economy (Shining Light on the Shadow Economy: Opportunities and Threats, OECD 2017):
 - **The Use of Data**
 - **Effective identification and registration**
 - **Whole of government approaches**

SUPPORT DATA PERPAJAKAN UNTUK KEBIJAKAN PEMERINTAH

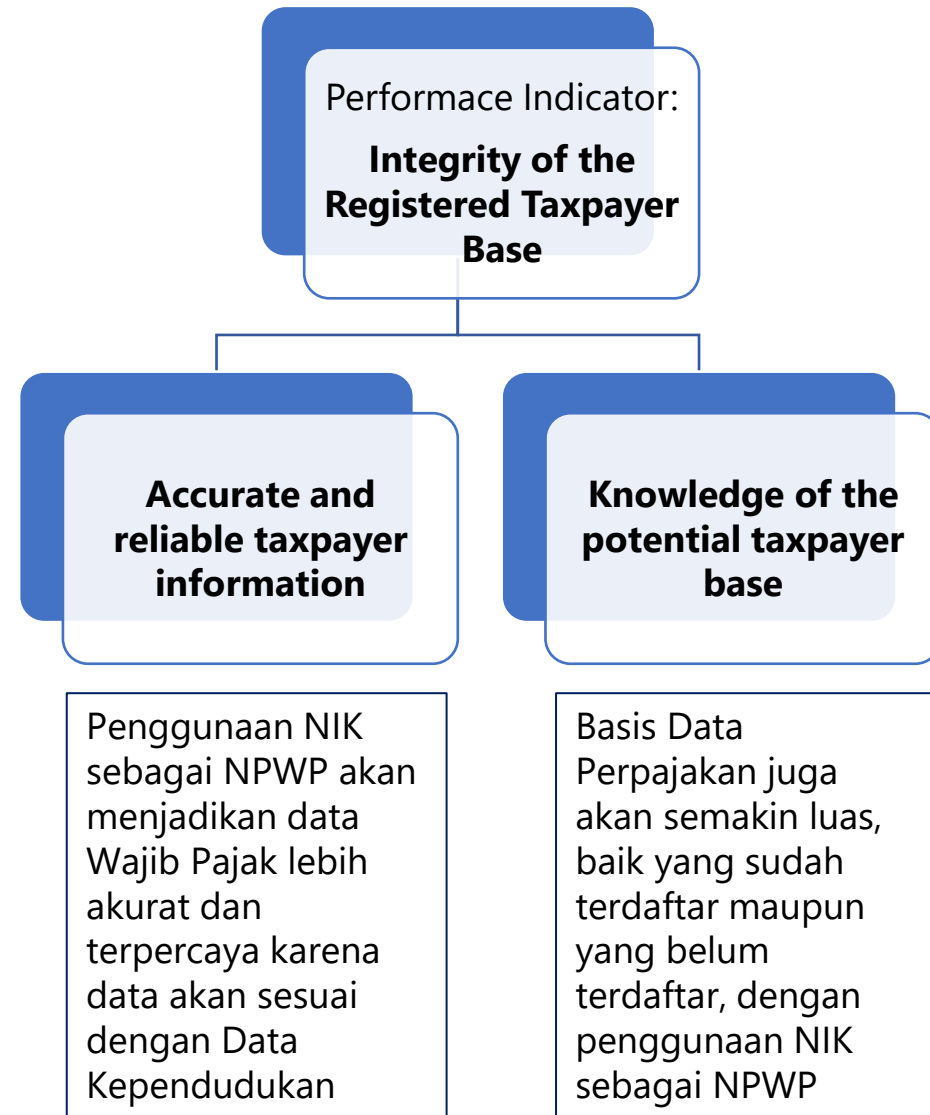
- Tax Administration Responses to COVID-19: **Assisting Wider Government (OECD 2020), new roles of tax administration to assist in the provision of wider government support** (insentives, cash transfer, job support, etc) during outbreak of COVID-19.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI), Data yang dihasilkan oleh produsen data harus berdasarkan prinsip berikut:
 - a. Memenuhi standar data;
 - b. Memiliki metadata;
 - c. Memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
 - d. **Menggunakan kode referensi dan/atau data induk.**

KONDISI INTEGRASI DATA YANG BELUM OPTIMAL

- Matching rate **NIK dan NPWP** juga masih rendah karena belum ada database perpajakan yang solid (LAPORAN PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI TRIWULAN VII TAHUN 2020, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi)



PENERAPAN NIK SEBAGAI NPWP DALAM PENERAPAN TADAT



TADAT menilai kinerja sistem administrasi perpajakan dengan mengacu pada sembilan area, antara lain:

1. Integrity of the Registered Taxpayer Base

Pendaftaran wajib pajak dan pemeliharaan database wajib pajak yang lengkap dan akurat sebagai dasar untuk administrasi perpajakan yang efektif.



BEST PRACTICE BENCHMARKING

SINGAPURA

- NPWP bagi Penduduk Singapur menggunakan nomor kependudukan (*Individual ID number for Singapore Citizens or Permanent Residents of Singapore* **is using National Registration Identity Card Number (NRIC)** .
- Bagi orang pribadi asing (WNA) yang tidak memiliki nomor kependudukan dan bekerja atau tinggal di Singapura menggunakan nomor administrasi yang diterbitkan Kementerian Tenaga kerja (*Individual ID number for Foreign Individuals who work/reside in Singapore and hold a Work Pass Card such as an Employment Pass or an Immigration Pass issued by the Ministry of Manpower* ("MOM")

AMERIKA SERIKAT

- *U.S. taxpayer identification numbers include a Social Security Number (SSN), which is issued to individuals by the Social Security Administration.*
- *In addition, an Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) is issued to individuals who are required to have a U.S. taxpayer identification number but who do not have and are not eligible to obtain an SSN.*

BELANDA

- NPWP diterbitkan sejak lahir di administrasi kependudukan (**A TIN is allocated to natural persons at birth or at registration at the municipality**).

1. Mendukung penggunaan nomor identitas yang terstandardisasi dan terintegrasi berupa NIK sebagai SIN (Single Identification Number) sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik sebagai kode referensi dalam pelayanan publik untuk **mendukung kebijakan basis data nasional (satu data Indonesia)**.
2. SIN mengintegrasikan data *financial* dan *non financial* sehingga dapat mendukung ketersediaan data sehingga **memudahkan Wajib Pajak pemenuhan administrasi perpajakannya**, sekaligus dapat **menjadi alat uji untuk menjamin kebenaran pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak**.
3. Pengintegrasian basis data nasional **menjamin tata Kelola Data yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian dari program dan kebijakan pemerintah dengan tetap memperhatikan jaminan keamanan data**.



Mencapai Target Penerimaan Negara

- Meningkatkan potential income tax baik ekstensifikasi maupun intensifikasi berdasarkan transaksi berbasis NIK
- Meningkatkan penerimaan melalui perluasan dan peningkatan integritas basis data perpajakan

Meningkatkan akurasi pemberian fasilitas untuk membantu pertumbuhan ekonomi

- NIK terhubung dengan banyak layanan pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, ijin usaha, dan layanan lain sehingga analisis dalam rangka pemberian fasilitas lebih komprehensif

Mengurangi beban administrasi untuk jangka panjang

- SIN akan menjadi primary key dalam setiap layanan penduduk Indonesia, sehingga harus segera diantisipasi untuk meringankan beban administrasi dalam jangka panjang

Menteri Keuangan telah memutuskan

**NIK sebagai NPWP
bagi Penduduk Indonesia**



Tindak Lanjut:

Diatur dalam UU Harmonisasi
Peraturan Perpajakan BAB Perubahan
UU Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan

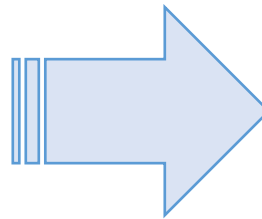
Pasal 2 UU HPP:

1a. Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan

10. Dalam rangka penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan

PENGGUNAAN NIK SEBAGAI NPWP ORANG PRIBADI

Untuk **mengintegrasikan basis data kependudukan** dengan sistem administrasi perpajakan dan **mempermudah WP orang pribadi** melaksanakan pemenuhan kewajiban hak dan kewajiban perpajakan



LIHAT:
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2021 TENTANG
PENCANTUMAN DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN/ATAU
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM PELAYANAN PUBLIK

MATERI KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

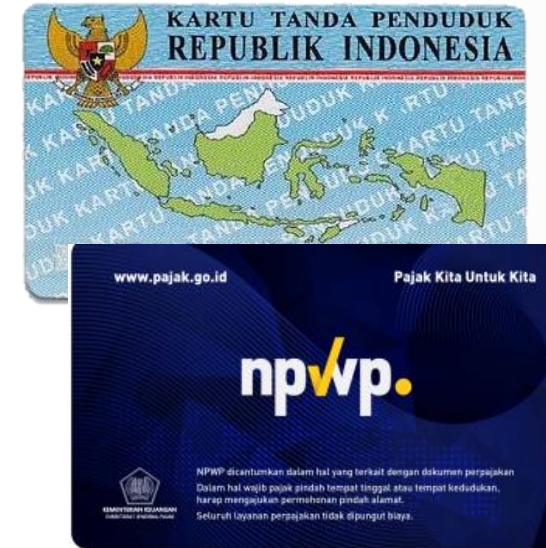
1 Penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi

- ✓ Integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan **bertujuan mempermudah WP orang pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban** perpajakan demi kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional.
- ✓ **Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta merta menyebabkan setiap orang pribadi membayar pajak.** Pembayaran pajak dilakukan apabila:
 - a. Penghasilan setahun di atas batasan PTKP; atau
 - b. Peredaran bruto di atas Rp 500juta/tahun bagi pengusaha yang membayar PPh Final 0,5% (PP-23/2018).

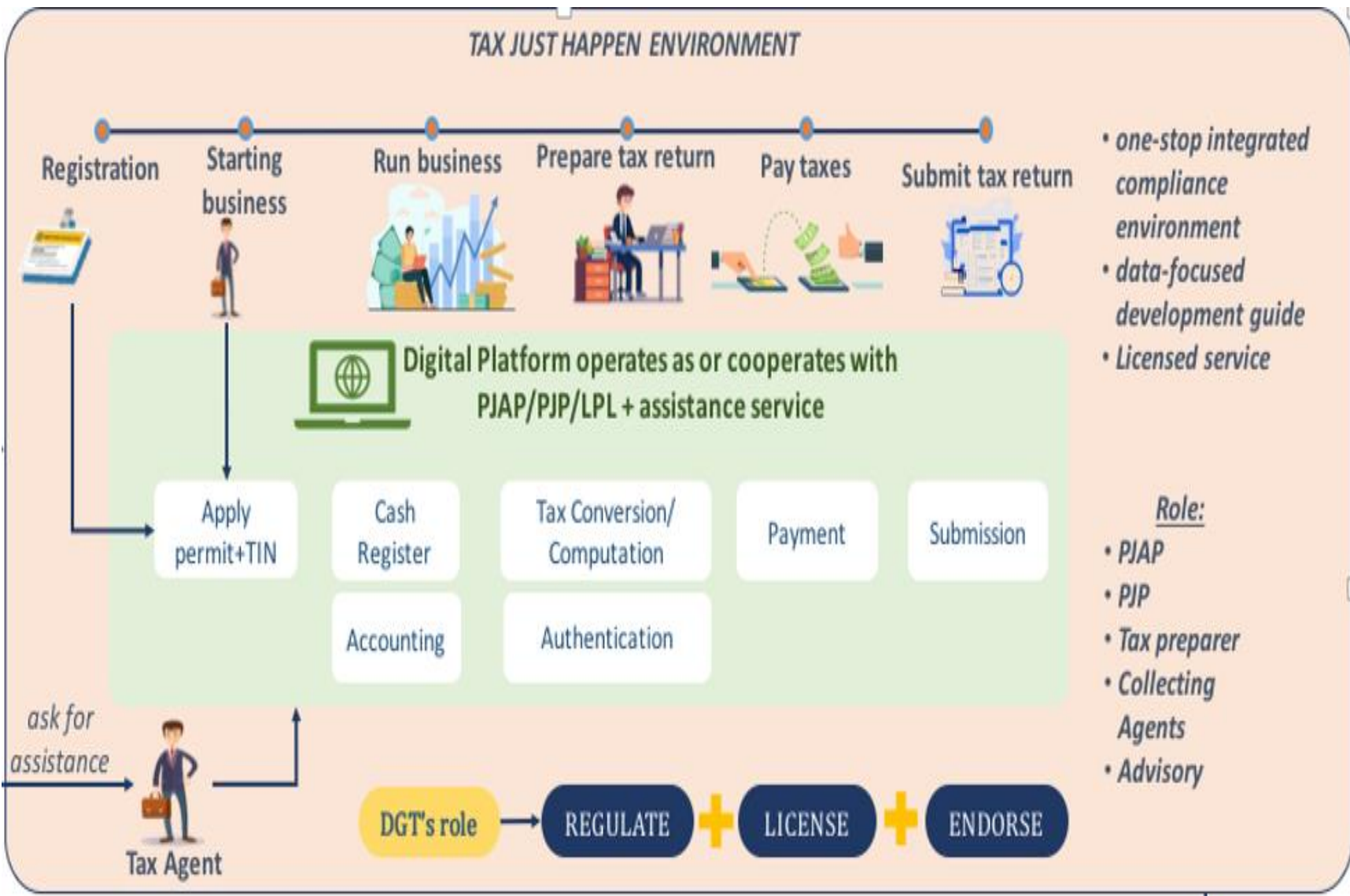


PENGGUNAAN NIK SEBAGAI NPWP ORANG PRIBADI

1. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. (PERPRES NO 83 TAHUN 2021, Pasal 1 ayat (4)).
2. Nomor Pokok Wajib Pajak, selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (PERPRES NO 83 TAHUN 2021, Pasal 1 ayat (5)).
3. Pengaturan dalam Peraturan Presiden ini meliputi: a. persyaratan penambahan NIK dan/atau NPWP penerima layanan; b. pencantuman NIK dan/atau NPWP penerima layanan; c. validasi atas pencantuman NIK dan/atau NPWP; d. pemadanan dan pemutakhiran Data Kependudukan dan basis data perpajakan; dan e. pengawasan. (PERPRES NO 83 TAHUN 2021, Pasal 2 ayat (4)).
4. Penambahan atau pencantuman NIK dan/atau NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. NIK sebagai penanda identitas bagi orang pribadi yang belum memiliki NPWP; b. NIK dan NPWP sebagai penanda identitas bagi orang pribadi yang telah memiliki NPWP; dan c. NPWP sebagai penanda identitas bagi Badan dan orang asing yang tidak memiliki NIK. (PERPRES NO 83 TAHUN 2021, Pasal 4).
5. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jet'rderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas keakuratan dan validitas Data Kependudukan berbasis NIK. (2) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas keakuratan dan validitas NPWP. (PERPRES NO 83 TAHUN 2021, Pasal 6).



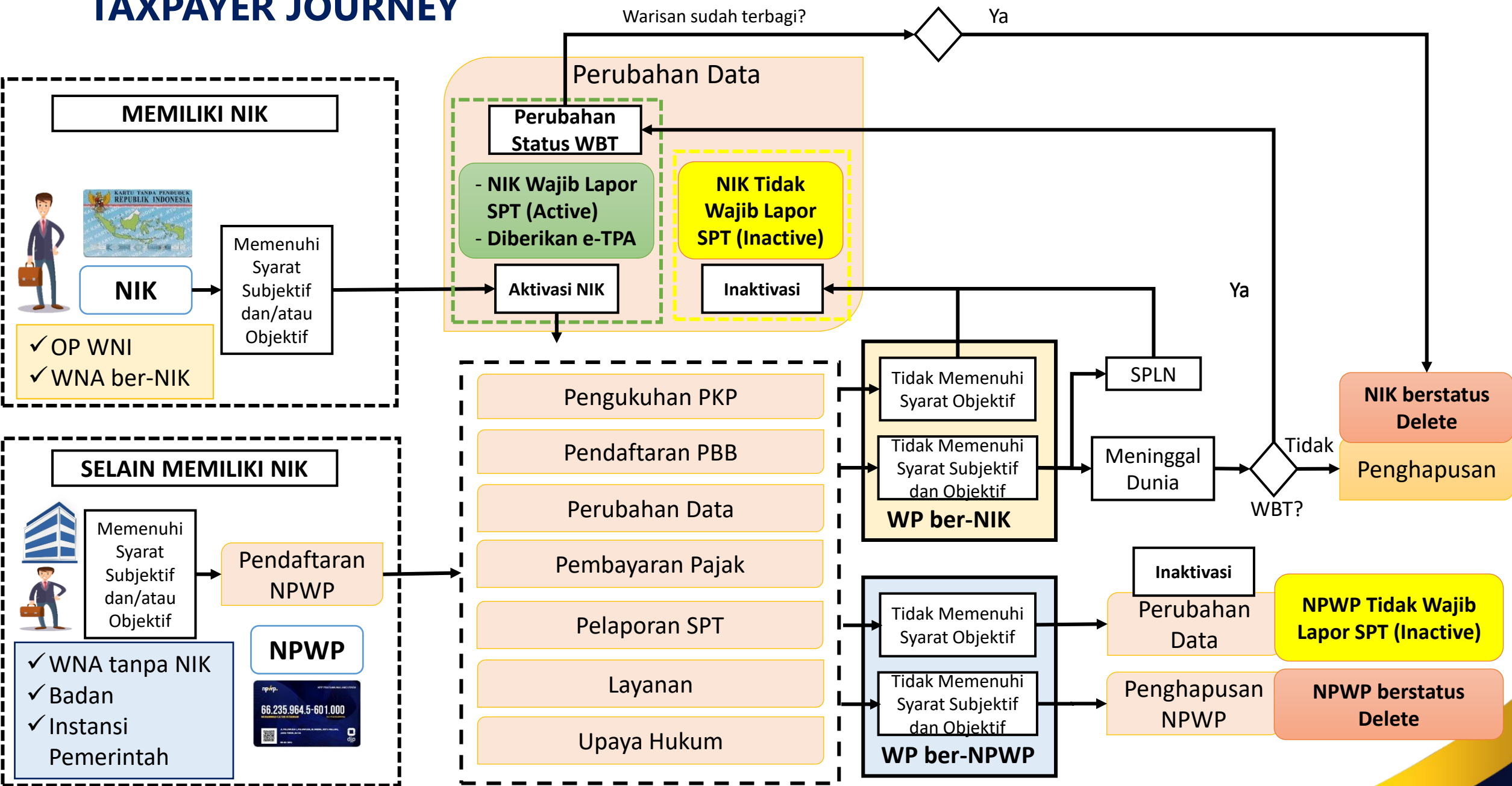
MENCIPTAKAN TAX JUST HAPPEN ENVIRONMENT



Dengan menjadikan NIK sebagai NPWP, akan bermanfaat bagi:

- **Wajib Pajak**
 1. Wajib Pajak tidak perlu mempunyai dua identitas
 2. Pendaftaran Wajib Pajak juga akan lebih mudah
 3. Proses permohonan Wajib Pajak pada berbagai pihak akan lebih mudah dengan
- **Pemerintah**
 1. Memiliki data yang baik untuk pengambilan keputusan
 2. Meningkatkan penerimaan negara
 3. Meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dalam berbagai sektor
- **Petugas Pajak**
 1. Memperluas Basis Permajakan
 2. Data Wajib Pajak terintegrasi
 3. Mempermudah Pengawasan Wajib Pajak
 4. Meningkatkan tax ratio
- **Pihak Lainnya**
 1. Tidak perlu menyediakan field data terpisah untuk perpajakan
 2. Data terintegrasi

TAXPAYER JOURNEY



QR CODE



http://bit.ly/UMS_Quis

- Hidupkan HP [1]
- Buka Tools [2]
- Scanner [3]



djp



TERIMA KASIH